

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti dapat mencantumkan acuan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Penelitian, dan Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Eka Putra & Kusumaningtyas, 2019) Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Labapada Perusahaan Dasar Dan Kimia Periode 2013-2016	H1:Ukuran dewan komisaris H2:Proporsidewan komisaris independen H3:Kepemilikan manajerial H4:Komite audit H5:Kepemilikan institusional	Kuantitatif	1.Variabel Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 2.Variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 3. Variabel Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 4. Variabel Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 5. Variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba

No	Nama, Tahun Penelitian, dan Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	(Budianto, 2018) Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2015 – 2017	H1: Ukuran Dewan Komisaris , H2 : Komite Audit, H3 : Kepemilikan Institusi, H4 : Kepemilikan Manajerial Komisaris	Kuantitatif	1. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas laba 2. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba 3. Kepemilikan institusi berpengaruh terhadap kualitas laba 4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas laba
3	(Melania, 2019) Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	H1 : Dewan Direksi , H2: Komite Audit , H3 : Kinerja Keuangan H4: Manajemen Laba	Kuantitatif	Dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, Komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, Dewan direksi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba, Komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba, Manajemen laba berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dan Manajemen laba tidak memediasi hubungan

No	Nama, Tahun Penelitian, dan Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				antara dewan direksi dengan kinerja keuangan serta Manajemen laba tidak memediasi hubungan antara komite audit dengan kinerja keuangan.
4	(Chairunesia et al., 2018) Pengaruh Good Corporate Governancedan Financial Distress terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Indonesia Yang Masuk Dalam Asean Corporate Governance Scorecard	X1 : Good Corporate Governance, X2 : Financial Distress, Y: Manajemen Laba	Kuantitatif	Good Corporate Governance dan Financial distress mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Manajemen Laba. Hasil uji t variabel secara parsial Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba Sedangkan Financial Distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Laba.
5	(Wayan, Arwinda, Kt, & Merkusiwati, 2014) Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Likuiditas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Financial Distress	H1 : Kepemilikan institusional H2 : Komisaris independen H3 : Kompetensi komite audit H4 : Likuiditas	Kuantitatif	kepemilikan institusional (H1), komisarisindependen (H2) serta kompetensi komite audit (H3), likuiditas (H4), dan leverage (H5) tidak berpengaruh signifikan pada kemungkinan terjadinya financial

No	Nama, Tahun Penelitian, dan Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		H5 : Leverage H6 : Ukuran perusahaan		distress.
6	(Nuryana & Surjandari, 2019)The Effect of Good Corporate Governance Mechanism, and Earning Management on Company Financial Performance	X1 : Good Corporate Governance, X2 : Earning Management, Y: Financial Performance	Kuantitatif	Mechanisms of good corporate governance, namely the board of directors, institutional ownership, managerial ownership, the proportion of independent board of directors and audit committee together have no effect on earnings management. Earnings management as measured by Variable discretionary accruals does not have a significant effect on cash flow return on assets. Good corporate governance and earnings management together affect the company's financial performance.
7	(Kurnia & Suaidah, 2019)Pengaruh Praktik Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba	Good Corporate Governance (X1), Ukuran Perusahaan(X2), Profitabilitas (X3), Manajemen	Kuantitatif	Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, Ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan Profitabilitas berpengaruh

No	Nama, Tahun Penelitian, dan Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Laba (Y)		terhadap manajemen laba
8	(Suaidah, Yuniep Mujati, 2016) Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba	Komite Audit (X1), Komisaris Independen (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), Profitabilitas (X4) Manajemen Laba (Y)	Kuantitatif	komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
9	(Ariesanti, 2014) Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Financial Distress Terhadap Manajemen Laba	Kepemilikan Instituonal (X1) Kepemilikan Manajerial (X2) Dewan Komisaris (X3) Manajemen Laba (Y)	Kuantitatif	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Variabel financial distress berpengaruh

No	Nama, Tahun Penelitian, dan Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				positif terhadap manajemen laba.
10	(Saraswati, Sulisty, & Mustikowati, 2016) Pengaruh Good Corporate Governance dan Financial Distress Terhadap Manajemen Laba	Dewan Komisaris (X1) Komite Audit (X2) Kepemilikan Instituonal (X3) Kepemilikan Manajerial (X4) Manajemen Laba (Y)	Kuantitatif	Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Financial distress berpengaruh terhadap manajemen laba

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan variabel dependen manajemen laba. Sedangkan perbedaannya ada pada variabel independen, periode tahun penelitian dan sektor perusahaan yang menjadi sample.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang dijadikan dasar ketika ingin melakukan bisnis di suatu perusahaan, dimana ketika pemilik tidak mengelola perusahaannya

sendiri melainkan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain. Menurut (Pagalung, 2011) dalam Amelia dan Hernawati (2016) teori keagenan dikenalkan pada tahun 1976 oleh Jensen dan Mekling, yang kemudian dijadikan dasar untuk memahami tata kelola suatu perusahaan (*Corporate Governance*). Hal tersebut yang seringkali menimbulkan potensi terjadinya konflik diantara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*) yang biasanya disebut dengan konflik agensi (*agency problem*). Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa hubungan keagenan (*agency realition*) timbul karena adanya kontrak antara satu orang atau lebih yang memberikan perintah kepada orang lain untuk melaksanakan tugas atas nama *principal* (Chairunesia et al., 2018). Di dalam perusahaan *principal* merupakan seseorang yang menanamkan modal atau biasa disebut investor sedangkan agent merupakan manajemen yang menjalankan perusahaan. Pemegang saham mengukur baik buruknya kinerja manajer melalui laba yang dihasilkan. Sedangkan manajer melakukan usaha dalam rangka pencapaian laba yang maksimal demi memuaskan keinginan para pemegang saham. Sehingga besar kemungkinan manajer melakukan tindakan manipulasi kepada pemegang saham ketika melakukan pelaporan kondisi perusahaan agar terlihat baik dimata para pemegang saham meskipun hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi perusahaan yang ada. Titik berat dalam teori keagenan adalah menetapkan kontrak agar hubungan pemegang saham dan manajemen berjalan secara optimal. Lebih tepatnya teori keagenan memberikan solusi penyusunan kontrak dengan tujuan agar konflik yang timbul diantara pemegang saham dan manajemen dapat terminimalisir (Chairunesia et al., 2018).

Ada dua jenis kontrak yang dapat digunakan. pertama adalah kontrak berorientasi perilaku (behavioural oriented contract), sebagai contoh pengaturan melalui hirarki atau sistem gaji tetap. Kedua adalah kontrak berorientasi hasil (behavioural oriented contract), sebagai contoh pemberian opsi pada saham atau kompensasi berdasarkan komisi. Hubungan keagenan bisa berjalan efektif dan efisien apabila dilakukan pemilihan terhadap salah satu dari kontrak tersebut (Soemarso, 2018). Salah satu contoh konflik yang timbul diantara pemegang saham dan manajemen adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan keadaan yang muncul ketika manajemen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pemegang saham mengenai internal perusahaan dan tujuan perusahaan pada masa yang akan datang (Mahawyaharti, Ayu, & Budiasih, 2016). Kondisi ini yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk menyampaikan informasi yang tidak sebenarnya kepada pemegang saham, dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya. Soemarso(2018), mengungkapkan terdapat 5 (lima) permasalahan yang dihadapi dalam teori keagenan. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Benturan kepentingan (Conflict of interest) yang terjadi antara principal dan agen.
2. Sikap oportunitis yang terkandung dalam pribadi agen.
3. Perbedaan sikap dalam keengganan menanggung risiko (risk aversion).
4. Timbulnya biaya pada setiap penyelesaian masalah keagenan.
5. Asimetri informasi (information asymetry)

2.2.2. Good Corporate Governance

Menurut (Sulistyanto, 2018) *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem pengendalian internal untuk mengelola risiko melalui pengamatan aset dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham untuk waktu jangka panjang. *Good governance* juga dapat diartikan sebagai tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Ermayanti Dwi, 2016). Sedangkan menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seperangkat aturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pengelola perusahaan, pemegang saham, pemerintah, pihak kreditur, karyawan, serta pihak lain yang berkepentingan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau bisa disebut dengan system yang mengendalikan dan mengarahkan perusahaan.

Contoh dari *good corporate governance* adalah adanya pemisahan yang tegas antara fungsi dalam organisasi top management dengan personel yang mengisi fungsi-fungsi tersebut. Pemegang saham terpisah dari komisaris dan direksi, sementara komisaris terpisah dari direksi. Pemegang saham dilarang menjabat komisaris atau direksi, sedangkan komisaris dilarang memiliki hubungan istimewa (terafiliasi) dengan direksi .

Pengukuran Good Corporate Governance menggunakan pengukuran menurut (Pujiati, 2013) dengan kriteria penskoran dan bobot masing-masing sebagai berikut:

- a. Presence of Board of Commissioners: weight 45%

- b. Audit Commite: Weight 20%
- c. Management: Weight 20%
- d. Shareholder: Weight 15%

2.2.2.1.Mekanisme Good Corporate Governance

Menurut Siregar, dkk 2005 (dalam Herlambang dan darsono, 2015), diberlakukannya sistem *good corporate governance* di perusahaan dapat meminimalisir terjadinya manajemen laba. Sehingga pada penelitian ini pengukuran Good Corporate Governance menggunakan pengukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan instituonal.

1. Board of Commissioners / Dewan Komisaris

Menurut undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 ayat 6 dewan komisaris adalah organ yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada para direksi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 33/POJK.04/2014 menjelaskan bahwa dewan komisaris hanya terdiri atas 2 orang ,1 diantaranya adalah komisaris independen. Jika jumlah dewan komisaris lebih dari 2 orang, maka komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dewan komisaris pada perusahaan dibutuhkan sebagai control terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para manajer. Sehingga dengan adanya dewan komisaris diharapkan manajer tidak dapat melakukan manajemen laba sesuai dengan yang mereka inginkan. Selain itu, dewan komisaris harus melakukan pengambilan keputusan secara cepat, tepat, efisien dan dapat

bertindak independen. Dalam penelitian ini dewan komisaris diukur menggunakan rumus :

$$\text{Dewan Komisaris} = \text{In } \Sigma \text{ Komisaris Internal} + \text{Komisaris}$$

Dewan komisaris merupakan dewan yang bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Dalam penelitian ini dewan komisaris diukur menggunakan ukuran dewan komisaris yang dilihat dari jumlah seluruh anggota komisaris dalam perusahaan sampel (Pujiati, 2013)

Ukuran dewan komisaris dapat dilihat dari jumlah seluruh anggota komisaris dalam perusahaan sampel. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi.

Tabel 2.2 Range-Score ukuran Dewan Komisaris

Range	Score
0-2	2
3-5	4
6-8	6
8-11	8
>11	10

2. Audit Committee / Komite Audit

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 121, memungkinkan para Dewan Komisaris membentuk komite yang diperlukan dalam fungsi pengawasan. Komite yang sangat diperlukan oleh perusahaan terkait dengan

pengawasan adalah komite audit. Sesuai dengan Keputusan Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012, komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa Komite audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang dari pihak luar perusahaan dan komisaris. Kemudian diketuai oleh komisaris independen. Kompetensi dan independensi yang telah disyaratkan haruslah terpenuhi, karena dibentuknya Komite audit dituntut dapat meminimalisir perilaku oportunistik para manajer. Sehingga ketika kompetensi dan independensi tidak terpenuhi, maka tindakan manajemen laba tidak dapat dihindari. Menurut keputusan Bapepam Nomor:KEP-643/BL/2012 wewenang, tugas dan tanggung jawab komite audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas keterbukaan laoran keuangan.
2. Mendorong terbentuknya suatu struktur pengendalian intern yang memadai.
3. Menyiapkan surat uraian tugas maupun tanggungjawab komite audit selama
4. Tahun buku yang sedang diperiksa oleh eksternal audit.
5. Mengkaji kewajaran biaya audit eksternal, ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal.

Komite Audit = In Σ Anggota Komite Audit

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat oportunistik manajemen yang melakukan manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat oportunistik manajemen yang melakukan manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Aorora, 2018).

Ukuran komite audit yaitu jumlah total anggota komite audit baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan.

Tabel 2.3 Range-Score Ukuran Komite Audit

Range	Score
0-2	2
3-5	4
6-8	6
9-11	8
>11	10

3. Kepemilikan Manajerial (Managerial Ownership)

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Pihak manajemen adalah pengelola perusahaan, seperti direktur, manajer, dan karyawan. Manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi seorang

manajer perusahaan. Perbedaan motivasi akan menciptakan banyaknya manajemen laba yang berbeda, misalnya antara manajer yang juga sekaligus sebagai shareholder dan manajer yang tidak sebagai shareholder. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria, yaitu: 1) Perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer dan pemilik (owner manager); 2) Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik (non-owners manager). Dua kriteria ini bisa berpengaruh terhadap manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer bisa menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan melalui metode akuntansi yang telah diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Jensen dan Meckling (1976) dalam (Kusumawardhani, 2012) menyatakan bahwa untuk mengurangi konflik keagenan adalah dengan menaikkan kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan. Jika semakin besar kepemilikan manajemen pada perusahaan maka manajemen cenderung akan berusaha melakukan peningkatan kinerjanya guna kepentingan shareholder dan untuk kepentingan sendiri. Hal itu akan berpengaruh pada manajemen laba yang dihasilkan dan nilai perusahaan. Menurut (Ujiantho, 2007) dalam (Setianingsih, 2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh secara positif signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* pada proksi kepemilikan manajerial mampu meminimalkan ketidakselarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham. Untuk mengukur kepemilikan manajerial dengan rumus :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki manajemen}}{\sum \text{Saham yang beredar}}$$

Manajemen atau direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Ukuran dewan direksi adalah jumlah keseluruhan anggota dewan direksi.

Tabel 2.4 Range-Score Ukuran Kepemilikan Manajemen

Range	Score
0-2	2
3-5	4
6-8	6
9-11	8
>11	10

4. Kepemilikan Institusional (Institutional Ownership)

Jensen dan Meckling (1976) dalam (Kumala, 2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam menekan konflik keagenan yang timbul antara manajer dan pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan institusional dianggap bisa menjadi alat monitoring secara efektif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional mempunyai peran serta dalam pengambilan secara strategis sehingga tidak mudah akan percaya terhadap aktivitas manipulasi laba. Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional mempunyai arti penting dalam pengawasan manajemen sebab dengan adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan agar lebih optimal. Pengawasan tersebut pasti

akan menjamin kemakmuran bagi para shareholder, pengaruh kepemilikan institusional yang berperan sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan mengakibatkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghambat perilaku opportunistic manajer. Institutional shareholders, dengan kepemilikan saham yang besar, mempunyai insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan (Kumala,2014). Rumus yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\Sigma \text{ Saham yang dimiliki}}{\Sigma \text{ Saham yang beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan institusional dapat dilihat berdasarkan persentase kepemilikan saham oleh perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana dan institusi lain dibagi total jumlah saham yang beredar.

Tabel 2.5 Range-Score Ukuran Kepemilikan Istitusional

Range	Skor
0%-20%	2
21%-40%	4
41%-60%	6
61%-80%	8
81% keatas	10

Perhitungan score GCG masing-masing sampel adalah:

(Score yang diperoleh : score tertinggi) x % Bobot

Total Score = Jumlah dari score masing-masing point.

2.2.2.2 Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006 (dalam Sukrisno Agoes, 2011:101), semua jajaran di setiap perusahaan harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Transparansi (*transparency*)

Perusahaan berkewajiban untuk menyampaikan informasi secara relevan kepada para stakeholders. Artinya penyampaian informasi harus dilakukan dengan lengkap, benar, tepat waktu dan tidak ada hal yang disembunyikan, ditutup-tutupi maupun ditunda-tunda pengungkapannya.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan atau keputusan yang dibuat. Tercapainya kinerja yang berkesinambungan dapat dicapai dengan prinsip akuntabilitas. Sehingga perusahaan harus dikelola dengan benar dan terukur sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta tetap memperhitungkan kepentingan para *stakeholders*.

3. Responsibilitas (*responcibility*)

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukan pada saat mengelola perusahaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan sebagai bentuk kepercayaan yang telah diberikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat memelihara kesinambungan usaha dalam waktu jangka panjang dan mendapatkan predikat *good corporate citizen*.

4. Independensi (*independency*)

Perusahaan harus dikelola dengan pengambilan keputusan yang bersifat mandiri, profesional, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari pengaruh/tekanan manapun yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Perusahaan harus memberikan perlakuan kepada pemangku kepentingan secara wajar dan setara, baik pemangku kepentingan primer (karyawan, pemasok, pelanggan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder yaitu (masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya). Menurut Siregar, dkk 2005 (dalam Herlambang dan darsono, 2015), diberlakukannya sistem *good corporate governance* di perusahaan dapat meminimalisir terjadinya manajemen laba. Sehingga, pada penelitian ini pengukuran *Good Corporate Governance* menggunakan pengukuran dewan komisaris, komite audit, manajemen dan pemegang saham (Wahidahwati, 2010).

2.2.2.3 Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance (GCG)

Tujuan dan manfaat *good corporate governance* dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah :

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam rangka memperkuat posisi perusahaan kompetitif baik domestik maupun asing.

2. Mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan, dan efisien.
3. Melindungi pemegang saham, anggota dewan komisaris dan direksi dalam membentuk keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum.

2.2.3. Financial Distress

Perusahaan yang berjalan tidak lepas dari masalah *Financial Distress*. *Financial distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi menurut (Fathonah, 2017). Menurut (Ermayanti, 2011) salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah kegunaannya untuk meramal kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi kelangsungan hidup perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi kebangkrutan.

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kondisi *financial distress* perusahaan pada umumnya menggunakan rasio keuangan perusahaan. Kondisi *financial distress* tergambar dari ketidakmampuan perusahaan atau tidak tersedianya suatu dana untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Suatu perusahaan dapat dikatakan berada dalam kondisi *financial distress* atau kesulitan keuangan apabila perusahaan tersebut mempunyai laba bersih (*net profit*) negatif selama dua tahun berturut-turut. Sebuah perusahaan dikatakan mengalami kondisi *financial distress* yaitu pada saat perusahaan tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi jadwal pembayaran kembali

hutangnya kepada kreditur pada saat jatuh tempo. Dengan adanya ketidakmampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban keuangannya secara terus-menerus dapat membuat perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan (Sastianadan Fuad, 2013).

Menurut Hidayat dan Meiranto (2014) ada beberapa definisi kesulitan keuangan menurut tipenya, antara lain sebagai berikut

1. *Economic Failure*

Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutupi total biaya, termasuk *cost of capital*. Bisnis ini masih dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditur bersedia menerima tingkat pengembalian (*rate of return*) yang di bawah pasar.

2. *Business Failure*

Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi dengan alasan mengalami kerugian.

3. *Technical Insolvency*

Adapun sebuah perusahaan bisa dikatakan dalam keadaan *technical insolvency* apabila suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancarnya ketika jatuh tempo. Untuk mengukur perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan kita bisa menukurnya dengan rasio keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan pula sebagai alat analisis tingkat efektifitas kinerja perusahaan dengan membandingkan rasio keuangan dengan standar atau tolok ukur yang memadai untuk mendapatkan informasi yang akurat. Analisa

rasio keuangan bukanlah analisa akhir untuk mengambil keputusan. Analisa rasio keuangan merupakan petunjuk untuk melakukan analisa lanjutan. Analisa rasio keuangan yang digunakan dalam penilaian kinerja keuangan, yaitu:

1. rasio likuiditas

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*) =
$$\frac{\text{aset lancar}}{\text{kewajiban lancar}}$$

b. Rasio Cepat (*acid test Ratio*) =
$$\frac{\text{kas} + \text{setaraka} + \text{surat berharga} + \text{piutang}}{\text{kewajiban lancar}}$$

c. Waktu penagihan (*collection period*) =
$$\frac{\text{piutang rata-rata}}{\left(\frac{\text{penjualan}}{360}\right)}$$

d. Jumlah hari untuk menjual persediaan (*days to sell inventory*) =
$$\frac{\text{persediaan rata-rata}}{\frac{\text{harga pokok penjualan}}{360}}$$

2. Struktur Modal dan Solvabilitas

a. Total utang terhadap ekuitas (*total debt to equity*) =
$$\frac{\text{total kewajiban}}{\text{ekuitas pemegang saham}}$$

b. Utang jangka panjang terhadap ekuitas (*long term debt to equity*) =
$$\frac{\text{kewajiban jangka panjang}}{\text{ekuitas pemegang saham}}$$

c. Kelipatan bunga dihasilkan (*times interest earned*) =
$$\frac{\text{labasebelum pajak dan bunga}}{\text{beban bunga}}$$

3. Tingkat pengembalian investasi

a. Tingkat pengembalian asset (*return on asset-ROA*) =
$$\frac{\text{lababersih} + \text{beban bunga} \times (1 - \text{tarif pajak})}{\text{rata-rata total aset}}$$

b. Tingkat pengembalian ekuitas (*return on common equity*) =

$$\frac{\text{lababersih}}{\text{rata-rataekuitaspemegangsaham}}$$

4. Kinerja Operasi

a. Margin laba kotor (*gross profit margin*) =

$$\frac{\text{penjualan} - \text{hargapokokpenjualan}}{\text{penjualan}}$$

b. Margin laba operasi (*operating profit margin*) = $\frac{\text{labaoperasi}}{\text{penjualan}}$

c. Margin laba bersih (*net profit margin*) = $\frac{\text{lababersih}}{\text{penjualan}}$

5. Pemanfaatan Aset (*Asset Utilization*)

a. Perputaran kas (*cash turnover*) = $\frac{\text{penjualan}}{\text{rata-ratakasdansetarakas}}$

b. Perputaran piutang usaha (*accountreceivable turnover*) =

$$\frac{\text{penjualan}}{\text{rata-ratapiutang}}$$

c. Perputaran persediaan (*inventory turnover*) = $\frac{\text{hargapokokpenjualan}}{\text{rata-ratapersediaan}}$

d. Perputaran modal kerja (*working capital turnover*) =

$$\frac{\text{penjualan}}{\text{rata-ratamodalkerja}}$$

e. Perputaran asset tetap (PPE *turnover*) = $\frac{\text{penjualan}}{\text{rata-rataasettetap}}$

f. Perputaran total asset (*total asset turnover*) = $\frac{\text{penjualan}}{\text{rata-ratatotalaset}}$

6. Ukuran Pasar (*Market Measure*)

a. rasio harga terhadap laba (*price-to-earning ratio*) =

$$\frac{\text{hargapasarperlembarsaham}}{\text{labapersaham}}$$

- b. hasil laba (*earning yield*) = $\frac{\text{labapersaham}}{\text{hargapasarperlembarsaham}}$
- c. hasil dividen (*dividend yield*) = $\frac{\text{dividentunai persaham}}{\text{hargapasarperlembarsaham}}$
- d. tingkat pembayaran dividen (*dividend payout rate*) = $\frac{\text{dividentunai persaham}}{\text{labapersaham}}$
- e. harga terhadap nilai buku (*price-to-book*) = $\frac{\text{hargapasarperlembarsaham}}{\text{nilaibukuperlembarsaham}}$

Financial distress merupakan suatu kondisi perusahaan yang mengalami illikuid akan tetapi masih dalam keadaan solven. Berikut ini terdapat definisi *financial distress* yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Hanafi (2010:278) *financial distress* dapat digambarkan dari dua titik ekstrem yaitu kesulitan likuiditas jangka pendek sampai insolvabel. Kesulitan keuangan jangka pendek biasanya bersifat jangka pendek, tetapi bisa berkembang menjadi parah. Indikator kesulitan keuangan dapat dilihat dari analisis aliran kas, analisis strategi perusahaan dan laporan keuangan perusahaan.
2. Menurut Plat dan Plat dalam Fahmi (2013:158) mendefinisikan *financial distress* Sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. *Financial distress* dimulai dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas.

3. Menurut (Indri, 2012:103) *Financial distress* adalah suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai definisi dari *financial distress* dapat ditarik kesimpulan bahwa *financial distress* merupakan suatu masalah keuangan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan, *financial distress* merupakan tahapan ketiga dalam kebangkrutan dan kondisi *financial distress* terjadi sebelum perusahaan benar-benar mengalami kebangkrutan. Salah satu cara untuk memprediksi *financial distress* hingga kebangkrutan yaitu Model Altman's Z-score.

Menurut Fahmi (2013:158) pada saat ini banyak formula yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan tentang bankruptcy ini, salah satu yang dianggap populer dan banyak dipergunakan dalam berbagai penelitian serta analisis secara umum adalah model kebangkrutan Altman. Model Altman ini atau lebih umum disebut dengan Altman Z-score.

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam Syaryadi (2012:8) Altman's Z-score dikenal pula sebagai Altman Bankruptcy Prediction Model Z-score. Adapun pengertiannya adalah model ini memberikan rumus untuk menilai kapan perusahaan akan bangkrut. Dengan menggunakan rumus yang diisi (interplasi) dengan rasio keuangan maka akan diketahui angka tertentu yang ada menjadi bahan untuk memprediksi kapan kemungkinan perusahaan akan bangkrut.

Model Z-Score merupakan model multivariat dari financial distress yang telah dikembangkan di beberapa negara. Menurut Hanafi (2003:274-276) Model kebangkrutan sudah dikembangkan ke beberapa negara. Altman (1983,1984) melakukan survey model-model yang dikembangkan di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Swis, Brazil, Australia, Inggris, Irlandia, Kanada, Belanda, dan Perancis. Salah satu masalah yang bisa dibahas adalah apakah ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk prediksi kebangkrutan untuk semua negara, ataukah mempunyai kekhususan. Nilai Z-Score yang dikembangkan Altman, yaitu:

$$Z_i = 1,2 X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

Keterangan:

Z_i = Nilai Z-Score

X_1 = (Aktiva lancar – utang lancar)/Total Aset

X_2 = Laba yang ditahan/Total Aset

X_3 = Laba sebelum bunga dan pajak/Total Aset

X_4 = Nilai pasar saham biasa dan preferen/Nilai buku total utang

X_5 = Penjualan/Total Aset

Altman kemudian mengembangkan model alternatif dengan menggantikan variabel X_4 (Nilai pasar saham preferen dan saham biasa/nilai total buku utang).

Persamaan yang diperoleh adalah:

$$Z = 0.717X_1 + 0.847X_2 + 3.107X_3 + 0,420X_4 + 0.998X_5$$

Keterangan:

Z = Z-Score

X_1 = working capital to total assets

X2 = retained earning to total assets

X3 = earning before interest and taxes to total assets

X4 = book value of eqUity to book value of total debt

X5 = sales to total assets

Nilai cut-off adalah $Z < 1,81$ perusahaan masuk kategori bangkrut; $1,81 < Z$ -Score $< 2,99$ perusahaan masuk wilayah abu-abu (grey area atau zone of ignorance) atau daerah rawan dan $Z > 2,99$ perusahaan tidak bangkrut.

Tabel 2.6Indikasi Zscore

No	Z score	Indikasi
1	<1,81	Bangkrut
2	1,81-2,99	Grey Area/Zona of ignore
3	>2,99	Tidak bangkrut

Model Altman Z-score yang baru tersebut mempunyai kemampuan prediksi yang cukup baik yaitu (94% benar atau 62 benar dari total sampel 66),sedangkan model Altman Z-score yang asli memiliki kemampuan prediksi sebesar (95% benar atau 63 benar dari 66 sampel). Penelitian ini menggunakan model Altman Z-score yang pertama (asli) dalam mengukur financial distress karena model tersebut lebih baik dalam memprediksi financial distress yaitu 95% .

Kebangkrutan merupakan kondisi *financial distress* yang terburuk. *Financial distress* sendiri merupakan penurunan kondisi keuangan perusahaan sebelum mencapai kebangkrutan (Plattdan Platt, 2002). *Financial distress* diukur dengan menggunakan laba bersih operasi(net operating income).*Financial distress* dalam penelitian ini diproksikan dengan laba bersih operasi(net operating income) perusahaan, sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Wayan et al., 2014) dan

penelitian (Antikasari, 2017). *Financial distress* disajikan dalam bentuk variabel dummy. Variabel Dummy diberi kode nilai nol (0) dan nilai satu (1) (Ghozali, 2016). *Financial distress* jika selama dua tahun berturut-turut mengalami laba bersih operasi (net operating income) positif dikategorikan 0, sedangkan perusahaan yang mengalami laba bersih operasi negatif selama dua tahun berturut-turut dikategorikan mengalami *financial distress* dikategorikan 1.

2.2.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang berkaitan dengan struktur perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang mengacu pada total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar, semakin besar total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar maka ukuran suatu perusahaan juga akan semakin besar. Semakin besar aset, maka semakin besar modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka perputaran uang dan kapitalisasi perusahaan juga semakin besar (Sulistyanto, 2018). Dalam menilai ukuran perusahaan total aset sering digunakan apakah perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Perusahaan yang besar mempunyai jumlah aset yang relatif besar. Oleh karena itu perusahaan besar akan bertindak hati-hati dalam pengelolaan perusahaan dan pengelolaan laba cenderung dilakukan secara efisien (Hidayat, 2017)

Hal ini sesuai dengan pendapat Reviani dan Sudantoko (2012) apabila ukuran perusahaan merupakan nilai yang diberikan untuk menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dilihat dari total aset dan penjualan. Semakin besar total aset dan penjualan maka semakin besar ukuran

perusahaan. Dalam menilai ukuran perusahaan, total aset yang paling sering digunakan, karena perusahaan yang besar cenderung memiliki aset yang relatif besar. Pada perusahaan besar juga lebih bersikap hati-hati saat melakukan pengolahan perusahaan dan pengelolaan laba secara efisien. Sehingga pada penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

2.2.5 Manajemen Laba

Perusahaan tidak lepas dari manajemen laba. Secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau memengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2018). Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk memengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan (Sulistyanto, 2018)

Secara umum manajemen laba dilakukan oleh manajer untuk memberikan informasi yang menyesatkan kepada *stakeholder* tentang laporan keuangan yang disajikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Manajemen laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi tertentu oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu (Scott, 2007:45). Konsep manajemen laba ini sesuai dengan pendapat Davidson, Stickney,

dan Weil dalam Sulistyanto (2006:61) yang menyatakan manajemen laba merupakan suatu proses pengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan. Definisi tersebut menunjukkan manajemen laba sebagai aktivitas yang biasa dilakukan manajer dalam menyusun laporan keuangan, dalam penelitian(Ermayanti, 2016).

Informasi laporan keuangan merupakan kondisi dari suatu perusahaan, oleh karena itu seseorang dapat mengetahui kinerja perusahaan melalui manajemen laba di perusahaan tersebut. Manajemen laba adalah perilaku oportunistik manajer dalam rangka mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena menguasai informasi lebih banyak tentang perusahaan (Ultero -Gonzales & Callado-Munoz, 2016).

Sedangkan menurut Scout (2015:445) manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari Standar Akuntansi Keuangan yang ada secara alamiah agar dapat memaksimalkan utilitas serta nilai pasar perusahaan dengan tujuan untuk menyesatkan *stakeholder* (pemegang saham). Sehingga tindakan manajemen laba dipercaya dapat mengurangi kredibilitas suatu laporan keuangan dan merupakan suatu tindakan yang mengganggu pemakai laporan keuangan karena manajemen dengan sadar mempengaruhi laporan keuangan agar terlihat lebih baik. Terdapat tiga jenis strategi manajemen laba yang sering kali digunakan oleh manajer untuk mencapai tujuan manajemen laba jangka panjang(Sulistyanto, 2018) :

- a. Manajer meningkatkan laba (income increasing) periode kini. Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode saat ini agar perusahaan dapat dipandang lebih baik. Serta memungkinkan kenaikan laba pada beberapa periode.
- b. Manajer melakukan “mandi besar”(big bath). Strategi *big bath* dilakukan melalui penghapusan (write off) sebanyak mungkin pada satu periode. Kebanyakan periode yang dipilih adalah periode dengan kinerja yang buruk (sering kali pada masa resesi di mana perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk) atau suatu terjadinya peristiwa yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi *big bath* dilakukan laba pada periode sebelumnya mengalami peningkatan. Oleh karena sifat *big bath* yang tidak biasa dan tidak berulang, pemakai cenderung tidak memperhatikan dampak keuangannya. Hal ini memberikan kesempatan untuk menghapus semua dosa masa lalu dan memberikan kesempatan dalam peningkatan laba di masa depan.
- c. Manajer mengurangi fluktuasi laba dengan perataan laba (income smoothing). Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini, manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga melingkupi bagian laba yang tidak dilaporkan saat periode baik dengan membentuk cadangan “bank” laba dan melaporkan laba saat periode buruk.

2.2.5.1 Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Banyak alasan untuk melakukan tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh seorang manajer. Manajemen laba dalam kondisi baik dilihat dari faktor faktor yang mempengaruhinya, menurut Sulistiawan(2011:31) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajer melakukan manajemen laba, antara lain:

1. Motivasi Politik

Perusahaan yang besar dan industry strategis cenderung untuk melakukan penurunan laba pada masa kemakmuran yang tinggi. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan fasilitas yang baik dari pemerintah.

2. Motivasi perpajakan

Perpajakan merupakan alasan mengapa perusahaan menurunkan labanya. Tujuan dari hal tersebut adalah agar pajak yang dibayar perusahaan tidak terlalu besar.

3. Rencana Bonus

Pada perusahaan yang menerapkan bonus, manajer cenderung untuk menaikkan laba. Dengan harapan dapat memperoleh bonus yang lebih besar.

4. Kontrak Hutang Jangka Panjang

Pada saat perusahaan semakin dekat dengan waktu pelanggaran perjanjian utang, manajer akan menggunakan metode akuntansi yang bisa memindahkan laba periode mendapat laba periode berjalan dengan tujuan perusahaan terhindar dari pelanggaran kontrak utang.

5. Penawaran Saham Perdana

Saat penawaran saham perdana perusahaan cenderung akan menaikkan labanya. Karena hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk kepada investor berhubungan dengan nilai perusahaan.

6. Pergantian CEO

Seorang CEO yang mendekati masa pension atau masa kontrak akan melakukan strategi menaikkan laba perusahaan. Dengan tujuan meningkatkan jumlah bonus yang akan diterimanya.

2.2.5.2 Teknik Manajemen Laba

Menurut Ita (2017), Manajemen laba dapat dilakukan dalam 3 teknik, yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat perkiraan akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui perkiraan antara lain perkiraan tingkat piutang tak tertagih, perkiraan kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain sebagainya.

2. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Contoh rekayasa biaya atau pendapatan adalah mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, serta mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.

3. Mengubah metode akuntansi

Contoh perubahan metode akuntansi adalah merubah metode penyusutan aktiva tetap yaitu dari metode garis lurus menjadi metode penyusutan angka tahun.

2.2.5.3 Model-Model Pengukuran Manajemen Laba

Pengukuran manajemen laba terbentuk dari beberapa model. Menurut (Suyono, 2017), terdapat beberapa model pengukuran manajemen laba antara lain sebagai berikut:

1. Model Healy

Healy Model (1985) menguji manajemen laba dengan membandingkan rata-rata total akrual di seluruh variabel pembagian manajemen laba. Studi Healy berbeda dengan kebanyakan studi manajemen laba lainnya karena ia memprediksi bahwa manajemen labasistematis terjadi dalam setiap periode. Variabel pemisahannya membagi sampel menjadi tiga kelompok, dengan pendapatan diprediksi akan dikelola ke atas di salah satu kelompok dan ke bawah pada dua kelompok lainnya. Kesimpulan kemudian dilakukan melalui perbandingan berpasangan dari total akrual rata-rata pada kelompok di mana pendapatan diperkirakan akan dikelola ke atas dengan rata-rata total akrual untuk masing-masing kelompok di mana pendapatan diprediksi akan dikelola ke bawah. Pendekatan ini setara dengan memperlakukan seperangkat pengamatan dimana pendapatan diperkirakan akan dikelola ke atas sebagai periode estimasi dan himpunan pengamatan dimana pendapatan diperkirakan akan dikelola ke bawah sebagai periode peristiwa. Total akrual rata-rata dari periode estimasi kemudian mewakili ukuran akrual nondiscretionary. Total *accruals* (ACC_t) yang mencakup *discretionary* (DA_t) dan *non-discretionary* (NDA_t) *components*, dihitung sebagai berikut (Healy, 1985):

$$ACC_t = NA_t + DA_t$$

Selanjutnya total accrual diestimasi dengan menghitung selisih antara laba akuntansi yang dilaporkan dikurangi dengan arus kas operasi. Arus kas merupakan modal kerja dari aktivitas operasi dikurangi dengan perubahan-perubahan dalam persediaan dan piutang usaha, di tambah dengan perubahan-perubahan pada persediaan dan utang pajak penghasilan. Sehingga formula selengkapnya menjadi sebagai berikut (Healy,1985):

$$ACC_t = -DEP_t - (XI_t \times D_1) + \Delta AR_t + \Delta INV_t - \Delta AP_t - \{(\Delta TP_t + D_t) \times D_2\}$$

Keterangan:

ACC_t = Total *accrual* di tahun t

DEP_t = Depresiasi di tahun t

XI_t = Extraordinary Items di tahun t

ΔAR_t = Piutang usaha di tahun t dikurangi piutang usaha di tahun t-1.

ΔINV_t = Persediaan di tahun t dikurangi persediaan di tahun t-1

ΔAP_t = Utang usaha di tahun t dikurangi utang usaha di tahun t-1

ΔTP_t = Utang pajak penghasilan di tahun t dikurangi utang pajak penghasilan di tahun t-1

$D_1 = 1$ jika rencana bonus dihitung dari laba setelah extraordinary items, 0 jika rencana bonus dihitung dari laba sebelum extraordinary items;

$D_2 = 1$ jika rencana bonus dihitung dari laba sesudah pajak penghasilan, 0 jika rencana bonus dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan

2. Model DeAngelo

DeAngelo (1986) menguji manajemen laba dengan menghitung perbedaan pertama dalam total akrual, dan dengan mengasumsikan bahwa perbedaan pertama

memiliki nilai nol yang diharapkan berdasarkan hipotesis nol yang menyatakan tidak ada manajemen laba. Model ini menggunakan total akrual periode lalu (diskalakan dengan total aset t-1) sebagai ukuran akrual nondiskritoner. Dengan demikian, Model DeAngelo untuk akrual nondiskritoner adalah (DeAngelo, 1986):

$$NDA_t = TA_{t-1}$$

Dechow et al. (1995) menjelaskan bahwa Model DeAngelo dapat dipandang sebagai kasus khusus dari Model Healy, di mana periode estimasi akrual nondiskretioner dibatasi pada pengamatan tahun sebelumnya. Gambaran umum Model Healy dan DeAngelo adalah bahwa keduanya menggunakan total akrual dari periode estimasi ke proxy untuk akrual nondiskretioner yang diharapkan. Jika akrual nondiskretioner konstan dari waktu ke waktu dan akrual diskresioner memiliki rata-rata nol pada periode estimasi, maka Model Healy dan DeAngelo akan mengukur akrual nondiskritoner tanpa kesalahan. Namun, jika akrual nondiskritoner berubah dari satu periode ke periode lainnya, maka kedua model akan cenderung mengukur akrual nondiskritoner dengan kesalahan. Selanjutnya Dechow et al. (1995) menjelaskan bahwa ketika akrual nondiskretioner mengikuti proses yang konstan, maka model Healy lebih sesuai digunakan. Sebaliknya, jika akrual nondiskretioner mengikuti proses yang acak, maka model DeAngelo lebih sesuai.

3. Model Jones

Jones (1991) mengusulkan sebuah model yang menyederhanakan anggapan bahwa akrual nondiskretioner bersifat konstan. Modelnya mencoba mengendalikan

efek perubahan pada lingkungan ekonomi perusahaan terhadap akrual nondiskretioner. Model Jones untuk akrual nondiskretioner pada tahun yang bersangkutan adalah (Jones, 1991):

$$NDA_t = \alpha_1 (1 / A_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_t) + \alpha_3 (PPE_t)$$

Keterangan:

NDA_t = Nondiskretioner akrual pada tahun t

ΔREV_t = pendapatan pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1 dibagi dengan Total aset pada t-1

PPE_t = property, pabrik dan peralatan pada tahun t dibagi dengan total aset pada t-1

A_{t-1} = total aset pada tahun t-1

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = parameter-parameter spesifik perusahaan.

Estimasi parameter spesifik perusahaan ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) dihasilkan dengan menggunakan model berikut pada periode estimasi (Jones, 1991):

$$TA_t = a_1 (1 / A_{t-1}) + a_2 (\Delta REV_t) + a_3 (PPE_t) + v_t,$$

Dimana:

$a_1, a_2,$ dan a_3 menunjukkan estimasi koefisien regresi dari $\alpha_1, \alpha_2,$ dan α_3 .

Sedangkan TA adalah total akrual dibagi dengan total aset tahun t-1.

Dechow et al. (1995) menjelaskan bahwa hasil perhitungan Model Jones menunjukkan bahwa model tersebut berhasil menjelaskan sekitar seperempat variasi total akrual. Asumsi yang tersirat dalam model Jones adalah bahwa pendapatan bukan diskresioner. Jika pendapatan dikelola melalui pendapatan discretionary, maka Model Jones akan menghapus sebagian dari pendapatan

yang dikelola dari proxy akrual diskresioner. Misalnya, pertimbangkan situasi dimana manajemen menggunakan kebijaksanaannya untuk memperoleh pendapatan pada akhir tahun saat uang belum diterima dan sangat dipertanyakan apakah pendapatan tersebut telah diperoleh. Hasil dari pertimbangan manajerial ini akan meningkatkan pendapatan dan jumlah akrual (melalui peningkatan piutang). Model Jones menterjemahkan total akrual yang berhubungan dengan pendapatan dan oleh karena itu akan mengekstrak komponen akrual diskresioner ini, yang menyebabkan estimasi manajemen laba menjadi bias terhadap nol. Jones mengakui keterbatasan model ini di dalam tulisannya (Dechow et al., 1995).

4. Model Industri

Dechow dan Sloan (1991) menyusun model pengukuran manajemen laba yang dikenal dengan Model Industry. Serupa dengan Model Jones, Model Industrimenyederhanakan anggapan bahwa akrual nondiskretioner konstan sepanjang waktu. Namun, alih-alih mencoba secaralangsung memodelkan faktor penentu akrual nondiskritioner. Model Industri mengasumsikan bahwa variasi dalam faktor penentu akrual nondiskresioner adalah umum di seluruh perusahaan di industri yang sama. Model Industri untuk akrual nondiskritioner adalah (Dechow dan Sloan, 1991) :

$$NDA_t = \gamma_1 + \gamma_2 \text{medianI}(TA_t)$$

Dimana:

NDA_t = Nondiskritioner akrual pada tahun t

MedianI(TA_t)= nilai median dari total akrual yang diukur dengan aset tahun $t-1$ untuk semua perusahaan non-sampel dalam kode industry yang sama.

Parameter spesifik perusahaan γ_1 dan γ_2 diperkirakan menggunakan koefisien regresi pada pengamatan di Periode estimasi.

Kemampuan Model Industri untuk mengurangi kesalahan pengukuran dalam akrual diskresioner bergantung pada dua faktor. Pertama, Model Industri hanya menghilangkan variasi akrual nondiscretionary yang umum terjadi diperusahaan-perusahaandi industri yang sama. Jika perubahan akrual nondiskretioner mencerminkan respons terhadap perubahan dalam keadaan spesifik perusahaan, maka Model Industri tidak akan mengekstrak semua akrual *nondiscretionary* dari *proxy akrual diskresioner*. Kedua, Model Industri menghilangkan variasi dalam akrual diskresioner yang berkorelasi di seluruh perusahaan di industri yang sama, yang berpotensi menimbulkan masalah. Tingkat keparahan masalah ini bergantung pada sejauh mana stimulus manajemen laba berkorelasi di antara perusahaan perusahaan di industri yang sama (Dechow et al., 1995).

5. Model Modifikasi Jones

Dechow et al. (1995) mempertimbangkan versi modifikasi Model Jones dalam analisis empiris. Modifikasi ini dirancang untuk menghilangkan kemungkinan dugaan Model Jones untuk mengukur akrual diskresioner dengan kesalahan ketika diskresi manajemen dilakukan terhadap pendapatan. Dalam model yang dimodifikasi, akrual nondiskretioner diperkirakan selama periode

peristiwa (yaitu, selama periode di mana manajemen laba dihipotesakan. Penyesuaian yang dilakukan terhadap Model Jones asli adalah bahwa perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang pada periode kejadian. Model Jones asli secara implisit mengasumsikan bahwa diskresi tidak dilakukan terhadap pendapatan baik dalam periode estimasi atau periode peristiwa. Versi Modifikasi Model Jones secara implisit mengasumsikan bahwa semua perubahan dalam penjualan kredit pada periode kejadian berasal dari manajemen laba, hal ini didasarkan pada penalaran bahwa lebih mudah mengelola pendapatan dengan menerapkan diskresi atas pengakuan pendapatan atas penjualan kredit daripada mengelola pendapatan dengan menerapkan diskresi atas pengakuan pendapatan atas penjualan tunai (Dechow et al., 1995). Jika modifikasi ini berhasil, maka perkiraan manajemen laba seharusnya tidak lagi bias terhadap nol dalam sampel dimana manajemen laba telah dilakukan melalui pengelolaan pendapatan.

Formula selengkapnya dari Model John yang Dimodifikasi adalah sebagai berikut (Dechow et al., 1995):

- 1). Menghitung total accrual (TAC) yaitu laba bersih tahun t dikurangi arus kas operasi tahun t dengan rumus sebagai berikut:

$$TAC = NI_{it} - CFO_{it}$$

Selanjutnya, total accrual (TA) diestimasi dengan Ordinary Least Square sebagai berikut:

$$TA_{it}/A_{it-1} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2(\Delta Rev_{it}/A_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + \varepsilon$$

- 2). Dengan koefisien regresi seperti pada rumus di atas, maka *nondiscretionary accruals* (NDA) ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2(\Delta Rev_{it}/A_{it-1} - \Delta Rec_{it}/A_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/A_{it-1})$$

- 3). Terakhir, *discretionary accruals* (DA) sebagai ukuran manajemen laba ditentukan dengan formula berikut :

$$DA_{it} = (TA_{it}/A_{it-1}) - NDA_{it}$$

Keterangan :

DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i dalam periode tahun t

NDA_{it} = *Nondiscretionary Accruals* perusahaan i dalam periode tahun t

TA_{it} = Total accrual perusahaan i dalam periode tahun t

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i dalam periode tahun t

CFO_{it} = arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i dalam periode tahun t

A_{it-1} = total assets perusahaan i dalam periode tahun t-1

ΔRev_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan pendapatan perusahaan I pada tahun t-1

PPE_{it} = property, pabrik, dan peralatan perusahaan i dalam periode tahun t

ΔRec_{it} = piutang usaha perusahaan I pada tahun t dikurangi pendapatan perusahaan I pada tahun t-1.

ε = error

6. Model Dechow-Dichev

Dechow dan Dichev (2002) mengajukan sebuah model yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas akrual dalam laba yang tersaji di laporan

keuangan. Pengukuran didasari pada sebuah observasi yang menemukan bahwa akrual akan mampu menyesuaikan perubahan arus kas dari waktu ke waktu. Akan tetapi, seringkali akrual didasari pada suatu estimasi akan peristiwa yang akan datang, yang jika estimasi ini salah maka memerlukan penyesuaian di masa yang akan datang. Dengan demikian, kesalahan estimasi menjadi factor pengganggu yang dapat menurunkan kualitas akrual. Model ini memfokuskan diri pada pemanfaatan akrual untuk kepentingan oportunistis manajer yang dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya model ini menjelaskan bahwa karakteristik asal dari proses akrual menyarankan bahwa besaran kesalahan estimasi akan secara sistematis berhubungan dengan hal-hal fundamental perusahaan seperti lamanya siklus operasi perusahaan dan variabilitas operasional perusahaan. Selanjutnya model ini membangun rerangka akrual, dimana laba akan sama dengan arus kas ditambah dengan akrual, dengan formula seperti berikut (Dechow and Dichev, 2002):

$$E = CF + \text{Accruals}$$

Dari perspektif akuntansi, arus kas (CF) di kategori menjadi arus kas tahun lalu (CF_{t-1}), arus kas tahun berjalan (CF_t), dan arus kas masa depan (CF_{t+1}). Sehingga, rumus selengkapnya dari laba (E) adalah sebagai berikut (Dechow and Dichev, 2002):

$$E_t = CF_{t-1}^t + CF_t^t + CF_{t+1}^t + \varepsilon_{t+1}^t - \varepsilon_t^{t-1}$$

Dari rumus di atas, porsi akrual yang terdapat dalam laba (A_t) ditentukan dengan formula sebagai berikut (Dechow and Dichev, 2002):

$$A_t = CF_{t-1}^{t-1} - (CF_t^{t+1} + CF_t^{t-1}) + CF_{t+1}^t + \varepsilon_{t+1}^t - \varepsilon_t^{t-1}$$

Kemudian diukur perubahan modal kerja akrual (ΔWC) dengan formula sebagai berikut (Dechow and Dichev, 2002):

$$\Delta WC_t = b_0 + (b_1 \times CFO_{t-1}) + (b_2 \times CFO_t) + (b_3 \times CFO_{t+1}) + \varepsilon_t$$

7. Model Kothari

Kothari et al. (2005) berupaya menyempurnakan Model Jones, dengan menambahkan perubahan return on assets (ROA) untuk mengontrol kinerja. Dengan kata lain, model ini hanya menambahkan perubahan ROA dalam penghitungan akrual diskresioner. Model ini berargumen bahwa memasukan unsure ROA dalam penghitungan akrual diskresioner akan dapat meminimalkan kesalahan spesifikasi, sehingga akan mampu mengukur manajemen laba secara lebih akurat.

8. Model Stubben

Stubben (2010) menjelaskan bahwa model discretionary revenue (pendapatan diskresioner) lebih mampu mengatasi bias dalam pengukuran manajemen laba jika dibandingkan dengan akrual diskresioner. Hal ini karena model akrual diskresioner banyak menerima kritik akibat adanya bias dari gangguan kesalahan dalam melakukan estimasi atas diskresi manajer. Sehingga Stubben (2010) berargumentasi akan perlunya mengatasi bias tersebut dengan cara memusatkan perhatian pengukuran manajemen laba pada salah satu factor pembentuk laba. Dia berargumen bahwa pendapatan merupakan komponen terbesar yang menyumbangkan laba perusahaan dan juga sebagai subjek utama diskresi manajer, sehingga dengan memfokuskan pada pendapatan akan diperoleh estimasi diskresi yang lebih akurat untuk mengukur praktik manajemen

laba. Pendapatan diskresioner adalah selisih antara perubahan aktual piutang dan perubahan piutang yang diprediksi berdasarkan model. Piutang yang terlalu rendah tinggi secara tidak normal mengindikasikan adanya praktik manajemen laba dalam perusahaan. Untuk membandingkan model yang ada, Stubben (2010) membandingkan kemampuan model pendapatan diskresioner dan model akrual diskresioner yang umum digunakan (Jones, 1991; Dechow et al., 1995; Dechow and Dichev, 2002; Kothari et al. 2005) untuk mendeteksi kombinasi manajemen pendapatan dan biaya. Temuan menunjukkan bahwa ukuran pendapatan diskresioner sebenarnya menghasilkan perkiraan yang secara substansial tidak terlalu bias dan kesalahan pengukuran relative kecil dibandingkan dengan model akrual. Dengan menggunakan manipulasi simulasi (Kothari et al., 2005), Stubben (2010) menemukan bahwa model pendapatan menghasilkan perkiraan diskresi yang ditentukan dengan baik untuk perusahaan dalam masa pertumbuhan. Selanjutnya, formula model pendapatan diskresioner ditentukan dengan langkahlangkah sebagai berikut (Stubben, 2010):

1. Pendapatan (R) terdiri dari nondiscretionary revenues (RUM) dan discretionary revenues (δRM), sehingga formulanya adalah:

$$R_t = R_{it}^{UM} + \delta_{it}^{RM}$$

2. Selanjutnya, bagian (disimbolkan dengan c) *nondiscretionary revenues* tidak tertagih pada akhir tahun, sehingga model ini mengasumsikan bahwa tidak terjadi penagihan kas atas *discretionary revenues*. Sehingga, piutang usaha (AR) akan setara dengan jumlah nondiscretionary revenues yang

tidak tertagih ($c \times RUM$) dan *discretionary revenues* (δRM). Sehingga formula berikutnya adalah:

$$AR_{it} = c \times (R_{it}^{UM} + \delta_{it}^{RM})$$

3. Asumsi berikutnya adalah bahwa *discretionary revenues* meningkatkan piutang usaha dan pendapatan dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, *discretionary receivables* sama dengan *discretionary revenues*. Karena nondiscretionary revenues tidak dapat diobservasi, model ini mengatur ulang persyaratan-persyaratannya dan mengungkapkan *ending receivables* sebagai pendapatan yang dilaporkan. Kemudian digunakan selisih pertama untuk mengungkapkan *the receivables accrual*. Sebagai berikut:

$$\Delta AR_{it} = c \times \Delta R_{it} + (1 - c) \times \Delta \delta_{it}^{RM}$$

4. Akhirnya, estimasi *discretionary revenues* perusahaan sebagai ukuran manajemen laba ditentukan dari nilai residual persamaan berikut :

$$\Delta AR_{it} = \alpha + \beta \Delta R_{it} + \varepsilon_{it}$$

9. Model Pendekatan Baru

Dechow et al. (2011) mengusulkan sebuah pendekatan baru untuk mendeteksi manajemen laba yang sekaligus meningkatkan daya uji dan spesifikasi untuk meminimalkan besaran kesalahan estimasi dari model akrual diskresioner yang sebelumnya. Pendekatan ini mengeksplorasi karakteristik inheren manajemen laba berbasis akrual yang telah banyak diabaikan dalam penelitian sebelumnya. Secara khusus, penelitian ini menjelaskan bahwa setiap pengelolaan laba berbasis akrual dalam satu periode harus berbalik dalam periode

lain(reversal). Jika peneliti memiliki perkiraan waktu yang tepat mengenai periode dimana manajemen laba diharapkan berbalik, kekuatan dan spesifikasi pengujian untuk manajemen laba dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menggabungkan efek pembalikan ini. Misalnya, jika peneliti sama-sama akurat dalam memprediksi periode di mana manajemen laba terjadi dan periode di mana manajemen laba berbalik, kekuatan pengujian manajemen laba dapat meningkat akurasi lebih dari 40% dengan memasukkan faktor pembalikan. Sehubungan dengan pencegahan kesalahan spesifikasi dalam pengujian manajemen laba dalam sebuah sampel yang mengabaikan faktor karakteristik ekonomi, pengujian model ini mengharuskan variabel yang dihilangkan tidak berbalik dalam periode yang sama dengan manajemen laba. Sebagai contoh, ukuran perusahaan telah diidentifikasi sebagai variabel potensial berkorelasi penting yang diabaikan dalam pengujian manajemen laba (Ecker et al., 2011). Hal ini menjadi penting untuk menaruh perhatian pada variabel ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan cenderung bertahan, sehingga menggabungkan pembalikan akrual dapat secara substansial mengurangi kesalahan spesifikasi. Demikian pula, investasi baru telah diidentifikasi sebagai variabel berkorelasi penting yang diabaikan dalam pengujian manajemen laba (Suyono, 2017). Selama investasi baru tidak sepenuhnya dibalik (yaitu, dilikuidasi) dalam periode pembalikan manajemen laba, menggabungkan pembalikan akan mengurangi bias dalam pengujian. Model ini menunjukkan bahwa menggabungkan pembalikan akrual dapat memberikan solusi yang kuat untuk mengurangi kesalahan spesifikasi dalam berbagai karakteristik ekonomi yang berbeda. Selanjutnya Dechow et al. (2011)

mengembangkan formula baru untuk mengukur manajemen laba dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengembangkan formula untuk menghitung discretionary accruals (DA) sebagai berikut:

$$DA_{i,t} = \alpha + bPART_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Dimana:

PART = variabel dummy yang ditetapkan 1 pada periode di mana determinan yang dihipotesiskan atas manajemen laba memang terjadi dan 0 sebaliknya.

2. Mengajukan asumsi standar dari OLS, estimator OLS yaitu b dinotasikan dengan \hat{b} , merupakan estimator linier tidak bias yang terbaik dengan standar error. Sehingga formulanya adalah :

$$SE(\hat{b}) = S_e / [(n-1)S_{PART}]$$

Dimana:

n = Jumlah observasi

S_e = Standar error regresi

\hat{b} = besaran manajemen laba

S_{PART} = stndar deviasi atas sampel PART

Rasio \hat{b} terhadap $SE(\hat{b})$ memiliki distribusi t dengan $n-2$ degrees of freedom. Hipotesis nol yang menyatakan tidak ada manajemen laba ditolak jika hasilnya memiliki arah dan signifikan secara statistik pada tingkat konvensional. Akibatnya, t-statistik yang dihasilkan dan kekuatan pengujian manajemen laba menjadi semakin meningkat.

3. Karena akrual diskresioner sangat sulit untuk diobservasi secara langsung, maka dirumuskan proksi dari akrual diskresioner (DAP), yang merupakan akrual diskresioner yang mempertimbangkan unsure eror. Sehingga formulanya menjadi sebagai berikut:

$$DAP_{it} = (DA_{it} - \mu_{it}) + \eta_{it}$$

Dimana:

μ = akrual diskresioner yang secara tidak disengaja terhapus dari DAP

η = akrual non diskresioner yang secara tidak disengaja masih melekat di DAP

4. Untuk menganalisis kesalahan spesifikasi, selanjutnya DAP disubstitusikan terhadap DA dalam persamaan berikut ini:

$$DAP_{it} = \alpha + bPART_{it} + (-\mu_{it} + \eta_{it} + \varepsilon_{it})$$

Selanjutnya estimator OLS b yang diperoleh dari meregresikan DAP terhadap PART dinotasikan dengan \tilde{b} , merupakan kesalahan spesifikasi akibat kesalahan regresi $(-\mu + \eta)$. Secara spesifik \tilde{b} merupakan estimator bias dari b , yang dapat diketahui dengan formula sebagai berikut:

$$E(\tilde{b}) - b = \beta_{(-\mu + \eta)PART}$$

Dimana:

$\beta_{(-\mu + \eta)PART}$ = merupakan koefisien regresi dari hasil regresi $(-\mu + \eta)$ terhadap PART.

5. Menghitung standar eror \tilde{b} dengan formula sebagai berikut:

$$SE(\tilde{b}) = SE(\hat{b}) \sqrt{(1 - r^2_{(-\mu + \eta)PART}) / ((1 - r^2_{DAP(-\mu + \eta)PART}))}$$

Dimana:

$r^2_{(-\mu + \eta)(PART)} = r^2$ hasil regresi $(-\mu + \eta)$ terhadap PART.

$r^2_{(DAP)(-\mu + \square)(PART)} = r^2$ hasil regresi DAP terhadap komponen $(-\mu + \eta)$ yang merupakan orthogonal terhadap PART.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang beberapa model pengukuran manajemen laba, pada penelitian ini manajemen laba diproksikan menggunakan model Jones Modifikasi. Karena versi Modifikasi Model Jones secara implisit mengasumsikan bahwa semua perubahan dalam penjualan kredit pada periode kejadian berasal dari manajemen laba, hal ini didasarkan pada penalaran bahwa lebih mudah mengelola pendapatan dengan menerapkan diskresi atas pengakuan pendapatan atas penjualan kredit daripada mengelola pendapatan dengan menerapkan diskresi atas pengakuan pendapatan atas penjualan tunai. (Suyono, 2018)

2.3. Pengaruh Antar Variabel

Good Corporate Governance berpengaruh dengan manajemen laba, *Good Corporate Governance* digunakan untuk mengendalikan perusahaan agar dapat berjalan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan, Hubungan signifikan dalam suatu tata kelola keuangan perusahaan dapat dilihat dari *Financial Distress* sehingga dapat mengetahui pengaruh Manajemen laba di suatu perusahaan dalam ukuran tertentu besar atau kecilnya melalui kegaalan dalam *Financial Distress*.

2.3.1. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba

Perusahaan yang baik, memiliki tata kelola yang baik juga. *Good corporate governance* dikatakan sudah diterapkan dengan baik, apabila hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi telah konsisten dilaksanakan (Sulistyanto, 2018). Dengan kata lain, *Good Corporate governance* dapat diartikan sebagai sistem yang digunakan untuk mengendalikan perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Peneliti menduga bahwa perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang bagus akan menyajikan informasi secara akurat, relevan, terbuka dan tepat waktu sehingga setiap informasi yang disampaikan oleh perusahaan khususnya laba akan dipercaya oleh investor. Hal ini dibuktikan dengan penelitian (Melania, 2019) terdapat pengaruh terhadap manajemen laba.

2.3.2 Pengaruh Financial Distress Terhadap Manajemen Laba

Plat dan Plat (2006) mendefinisikan *financial distress* sebagai suatu kondisi perusahaan sedang mengalami penyimpangan dan tekanan yang secara bertahap akan mengarah kepada kebangkrutan. Kebangkrutan diartikan dengan kegagalan perusahaan membayar kewajiban. *Financial distress* terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. (RIFKA, 2017) mengemukakan bahwa perilaku *earnings management* meningkat seiring meningkatnya *financial distress* perusahaan. Dalam hal ini yang menjadi peran utama dalam kelangsungan hidup perusahaan adalah pihak manajemen. Sehingga seringkali pihak manajemen tidak berpikir panjang untuk melakukan tindakan memanipulasi laba guna menyelamatkan kelangsungan hidup perusahaan dengan kondisi yang sebelumnya tidak bisa dikendalikan, jadi manajemen laba ini dapat menarik investor agar

investor mau berinvestasi di perusahaan guna menutup kewajiban yang tidak bisa dibayar sehingga perusahaan mampu keluar dari kondisi *financial distress*.

Menurut (Chairunesia et al., 2018) temuan dari penelitian ini mengatakan bahwa *financial distress* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap manajemen laba, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ariesanti, 2014) menyatakan terdapat hubungan signifikan antara *financial distress* dengan manajemen laba. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati et al., 2016) yang menyatakan terdapat hubungan signifikan antara *financial distress* dengan manajemen laba. Ketiga penelitian di atas menunjukkan hubungan yang konsisten antara *financial distress* dengan manajemen laba.

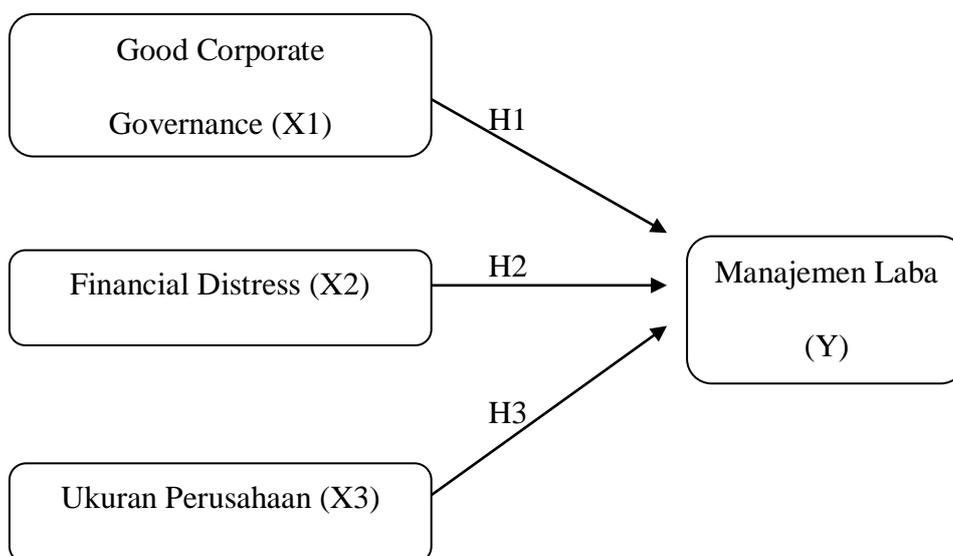
2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

Seberapa besar perusahaan melakukan manajemen laba dapat dilihat dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk meminimalisir praktik manajemen labanya. Hal ini terjadi karena pemegang saham dan pihak luar di perusahaan besar dianggap lebih kritis dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga tekanan yang lebih besar akan dihadapi perusahaan besar untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki ukuran yang relatif kecil, perusahaan tersebut cenderung melakukan manajemen laba untuk menunjukkan nilai perusahaan yang baik. (Agustia, 2018) membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap

manajemen laba. Hasil penelitian (Kurnia & Suaidah, 2019) juga menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka peneliti menyajikan kerangka konseptual yang dituangkan dalam model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1kerangka konseptual

2.5 Hipotesis

Menurut(Sugiyono, 2018) hipotesis merupakan jawaban/dugaan yang memiliki sifat sementara terhadap permasalahan pada penelitian, sampai terdapat bukti melalui data yang dikumpulkan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

H1: *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

H2: *Financial Distress* berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba.